REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS PENGADUAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE TAHUN 2022

No	Pengaduan/ Kasus	Sektor	Jenis Penanganan	Sumber/lokasi pengaduan	*Progress* Terakhir	Keterangan
1.	Jebolnya IPAL PT. TKA	Pabrik dan Perkebunan Sawit	Verifikasi Lapangan	PT. Tidar Kerinci Agung - Kab. Dharmasraya	Telah dilakukan verifikasi lapangan pada 13-15 Januari 2022 yang dilanjutkan dengan rapat pembahasan tindak lanjut verifikasi lapangan pada tanggal 11 Februari 2022 di DLH Prov. Sumbar dan di Kantor Bupati Dharmasraya dengan melibatkan masyarakat pengadu dan PT. TKA serta DLH Kab. Dharmasraya. Pada sesi 1 telah dicapai kesepakatan antara pihak pengadu (masy. Nagari Lubuk Besar) dengan pihak yang diadukan yakni PT. TKA, sedangkan pada sesi 2 belum dicapai kesepakatan antara pihak pengadu (masy. Nagari Alahan Nan Tigo) dengan pihak yang diadukan yakni PT. TKA dan pengadu dipersilahkan megambil penyelesaian lain. KLHK telah membalas surat kewenangan pemberian sanksi administrative masih menjadi kewenangan Gubernur Sumbar sepanjang belum ada perubahan persetujuan Lingkungan atau izin Lingkungan PT TKA.	a. Telah dilakukan penyelesaian sengketa lingkungan oleh DLH Prov. Sumbar dan DLH Kab. Dharmasraya dengan masyarakat pengadu. b. Telah dilakukan pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah. c. Telah dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan pelaksanaan SA PP.
2.	Jebolnya IPAL PT. KSI	Pabrik dan Perkebunan Sawit	Verifikasi Lapangan	PT. Kencana Sawit Indonesia - Kab. Solok Selatan	Telah dilakukan verifikasi lapangan oleh DLH prov. Sumbar, DLH Kab. Dharmasraya dan Dinas PerkimLH Kab. Solok Selatan pada 2–4 Februari 2022 ke PT. KSI Solok Selatan, dari hasil verlap diketahui kewenangan perizinan berada di KLHK karena Dok Lingk PT. KSI diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Telah dilalukan verifikasi pengaduan dan pengawasan oleh Dir. PPSA Gakkum KLHK	Dalam proses tindak lanjut hasil pengawasan dan penerbitan Sanksi Administratif oleh gakkum KLHK

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS PENGADUAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE TAHUN 2022

3.	Tumpahan Minyak di Teluk Bayur loading PT Padang Raya Cakrawala	Pelabuhan	Verifikasi Lapangan	PT. Pelindo Teluk Bayur - Kota Padang	Telah dilakukan verlap ke lokasi pengaduan pada Januari 2022 secara terkoordinasi antara DLH Prov. Sumbar dan DLH Kota Padang. Tgl 01 April 2022 pihak Pelindo telah dipanggil oleh Gakkum KLHK untuk pemberian keterangan. Telah dilakukan verifikasi pengaduan dan pengawasan penaatan Lingkungan ke PT Pelindo II Teluk Bayur Padang oleh Balai Gakkum Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Pekanbaru	PT Padang Raya Cakrawala telah diberikan Sanksi Administratif oleh DLH Kota Padang dan PT Pelindo II Teluk bayur dalam tindak lanjut hasil pengawasan oleh Gakkum Wilayah Sumatera
4.	Perusakan Terumbu Karang oleh Koperasi Minyak Atsiri Mentawai	Perkebunan	Verifikasi Lapangan	Koperasi Minyak Atsiri Mentawai – Kab. Mentawai	Telah dilakukan verifikasi lapangan pada 18-20 Maret 2022 dan dilanjutkan dengan rapat pembahasan tindak lanjut hasil verifikasi lapangan dengan DKP Prov. Sumbar, Balai Gakkum Sumatera dan DLH Kab. Kep. Mentawai. Dari hasil rapat disepakati bahwa Pemkab Kep. Mentawai akan menerbitkan SA Paksaan Pemerintah kepada Koperasi Minyak Atsiri Mentawai dengan salah satu muatan SA yakni melakukan kegiatan pemulihan terumbu karang.	Telah dilakukan penerbitan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah oleh Pemkab Mentawai dan pengawasan pelaksanaan SA PP.
5.	Pembuangan limbah mobil sedot tinja ke sungai (jembatan tamsis padang)	Pengelolaan Air Limbah	Verifikasi Lapangan	Kota Padang	Telah dilakukan peninjauan lapangan oleh Sdr. Teguh Ariefianto (Kabid P2KLPHL) dan Sdr. Agung Nugroho (PLH Ahli Muda) ke lokasi pengaduan dan telah dilakukan koordinasi dengan DLH Kota Padang.	Dalam penanganan DLH Kota Padang

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS PENGADUAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE TAHUN 2022

6.	Pelanggaran Tata Ruang Kegiatan pada Sempadan Danau Singkarak	Pariwisata	Verifikasi Lapangan	Kab. Solok	Pemkab Solok telah menerbitkan sanksi administrative atas pelanggaran tata ruang dan pihak pemrakarsa kegiatan telah menindaklanjuti sanksi dengan melakukan pembongkaran bangunan dan pengerukan lahan reklamasi pada kegiatan yang berada pada sempadan dan badan air Danau Singkarak.	Telah dilakukan pelaksanaan sanksi administrative pembongkaran bangunan dan pengerukan areal reklamasi
7.	Pembangunan Tempat Wisata tanpa Izin di Kecamatan Gunung Talang Kab. Solok	Pariwisata	Verifikasi Lapangan	Kab. Solok	Telah dilakukan verifikasi lapangan terkoordinasi DLH Provinsi Sumbar dan Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar serta Kementerian ATR BPN ke tempat wisata dan bangunan di kawasan Gunung Talang Kab. Solok yang menjadi objek pengaduan. Dari hasil verifikasi lapangan akan dilakukan pertemuan pembahasan hasil tindak lanjut dan tim meminta komitmen Pemkab Solok untuk menerbitkan sanksi administrative kepada pihak Daima Moosa terkait pelanggaran belum memiliki Perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan untuk kegiatan hotel/villa.	Dalam penanganan Dinas BMCKTR Prov. Sumbar dan Pemkab Solok
8.	Tambang Ilegal Pasaman Barat	Pertambangan	Verifikasi Lapangan	Kab. Pasaman Barat	• Telah dilakukan verifikasi lapangan terkoordinasi antara DLH Prov. Sumbar dan DLH Pasaman Barat • Telah dilakukan pemasangan papan larangan oleh OPD Pemprov Sumbar, OPD Pemkab Pasaman Barat, Balai Gakkum Sumatera, Kementerian ESDM, Polda Sumbar, dan Binda • Telah dilakukan penertiban dan penegakan hukum oleh Polda Sumbar dan Polres Kab. Pasaman Barat.	Sudah dilakukan penertiban dan penegakan hukum terpadu dan dalam penanganan Pemkab Pasaman Barat

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS PENGADUAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE TAHUN 2022

9.	PT. Incasi Raya Sodetan POM	Pabrik dan Perkebunan Sawit	Verifikasi Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Telah dilakukan verifikasi lapangan terkoordinasi antara DLH Prov. Sumbar dan Dinas PerlimtanLH Kab. Pessel. Dari hasil verifkasi pengaduan tidak terbukti terjadi pencemaran di daerah yang diadukan akan tetapi ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan Izin Lingkungan PT. Incasi Raya Sodetan POM. DLH Prov. Sumbar telah menyurati Dinas PerlimtanLH Kab. Pessel untuk menerbitkan SA sesuai kewenangan.	Dalam penanganan dan proses SA PP Dinas PerkimtanLH Kab. Pessel
10.	Gugatan perdata oleh Soni dkk ke PT. Incasi Raya Group	Perkebunan Sawit	Menghadiri Persidangan	Kab. Pesisir Selatan	Pihak DLH Prov. Sumbar telah menhadiri 4 (empat) panggilan sidang gugatan perdata di PN Painan. Dan pada sidang ke 3 kembali dilakukan penundaan karena penggugat merubah materi gugatan.	Dalam proses persidangan kedua gugatan baru di Pengadualan Negeri Painan
11.	Dugaan longsor akibat pembangunan depan perumahan Bukit Safa Marwa di Kota Padang	Perumahan	Verifikasi Lapangan	Kota Padang	Telah dilakukan verifikasi lapangan terkoordinasi dengan DLH Kota Padang. Pihak pemrakarsa kegiatan bersedia menghentikan kegiatan dan melakukan pembenahan terhadap lokasi yang terdampak	Dalam penanganan DLH Kota Padang
12.	Dugaan Pencemaran oleh PT. Transco Energi Utama Pessel	Pabrik dan Perkebunan Sawit	Verifikasi Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Telah dilakukan verifikasi lapangan terkoordinasi olehDLH Provinsi Sumbar dan DLH Kab. Pesisir Selatan. Dari hasil verlap ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan LH dan pihak perusahaan telah menutup saluran air limbah ke Batang Penamban. DLH Prov. Sumbar telah mengadakan rapat terkait penerbitan SA PP oleh DLH Kab. Pessel sesuai kewenangan.	Dalam penanganan dan proses SA PP Dinas PerkimtanLH Kab. Pessel.

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS PENGADUAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE TAHUN 2022

13.	Menghadiri gugatan terhadap PLTMH PT. Dempo Sumber Energi	PLTMH	Pengadilan	Kab. Pesisir Selatan	Pihak DLH Prov. Sumbar telah menghadiri 2 (dua) kali panggilan PN Painan, dimana pada sidang pengadilan kedua dilakukan rapat mediasi dengan hakim mediasi dan akan dilanjutkan pada tanggal 4 Januari 2023	Persidangan ketiga untuk rapat mediasi
14.	Dugaan Pencemaran oleh PT. Kemilau Permata Sawit Tapan	Pabrik dan Perkebunan Sawit	Verifikasi Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Telah dilakukan verifikasi pengaduan oleh DLH Provinsi Sumbar dengan Dinas PerkimtanLH Kab. Pesisir Selatan. Dilakukan pengambilan sampel air limbah, sampel air puritan dan sampel tanah.	Dalam proses penanganan oleh DLH Provinsi Sumbar dan telah diterbitkan Sanksi Administratif oleh Dinas PerkimtanLH Kab. Pesisir Selatan
15.	Tumpahan BBM truck PT Pertamina di Bukit Pulai	Transporter BBM	Verifikasi Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Telah dilakukan verifikasi pengaduan oleh DLH Provinsi Sumbar dengan Dinas PerkimtanLH Kab. Pesisir Selatan. Dilakukan pengambilan sampel tanah.	Dalam proses penanganan oleh DLH Provinsi Sumbar dan Dinas PerkimtanLH Kab. Pesisir Selatan
16.	Monev SA CV. Putra Idola	Pertambangan	Verifikasi Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	Telah dilakukan monev terkoordinasi dengan OPD terkait (Dinas ESDM, DPMPTSP, Satpol PP, Biro Hukum dan Kementerian ESDM dan Pemkab Pessel dan Pemko Padang).	Dalam penanganan DPMPTSP Prov. Sumbar
17.	Dugaan kerusakan lingkungan oleh tambang Abdel Hanif	Pertambangan	Verifikasi Lapangan	Kab. Solok	Telah dilakukan verifikasi pengaduan terkoordinasi dengan OPD terkait (Dinas ESDM, DPMPTSP, Satpol PP, Biro Hukum, Dinas PSDA, Kesbangpol, Dinas BMCKTR) dan Kementerian ESDM	Dalam penanganan Dinas ESDM Prov. Sumbar

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS PENGADUAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE TAHUN 2022

18.	Dugaan kerusakan mangrove oleh pengembangan Bandar Udara Rokot	Bandar Udara	Verifikasi Lapangan	Kab. Kepulauan Mentawai	• Telah dilakukan verifikasi pengaduan dan pengawasan penaatan Lingkungan terhadap pengembangan Bandar Udara Rokot Sipora dengan DLH Kab. Kepulauan Mentawai. • Telah dilakukan proses penyelidikan oleh Dirreskrimum Polda Sumbar dan diputuskan menjadi kewenangan penerapan Sanksi Administrtatif oleh Pemprov Sumbar.	Dalam proses pelaksanaan Sanksi Administratif Teguran Tertulis dan penanaman Kembali mangrove terdampak
19.	TUKS Semen Padang Teluk Bayur	TUKS Semen	Verifikasi Lapangan	Kota Padang	Telah dilakukan verifikasi pengaduan dan pengawasan penaatan Lingkungan dengan DLH Kota Padang	Dalam proses penerbitan Sanksi Administratif
20.	PT Bakapindo	pertambangan	Verifikasi Lapangan	Kabupaten Agam	Telah dilakukan verifikasi pengaduan dan verifikasi lapangan dengan Sat Reskrim Kota Bukittinggi, Dinas ESDM Provinsi Sumbar, Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar dan Polsek Kamang Magek	Dalam proses penanganan dengan Sat Reskrim Kota Bukittinggi
21.	Dugaan kerusakan mangrove di Hutan Lindung Katiagan Kinali	Perkebunan perladangan	Verifikasi administratif	Kabupaten Pasaman Barat	Telah dilakukan verifikasi Administratif merupakan pengaduan bidang Kehutanan karena diduga berada dalam Kawasan Hutan Lindung	Dalam proses penanganan pengaduan
22.	Pengaduan tambang PT Dian Indah Perdana di Kab Solok	pertambangan	Verifikasi Lapangan	Kabupaten Solok	Telah dilakukan verifikasi pengaduan dan verifikasi lapangan dengan Diresrimsus Bareskrim Polri dan Kementerian ESDM	Tidak terdapat aktifitas pertambangan
23.	Pengaduan tambang PT Mineral Sukses Makmur	pertambangan	Rapat	Kabupaten Solok	Telah dilakukan rapat pembahasan terkait dugaan IUP OP berada dalam Kawasan Hutan Lindung dengan OPD Pemprov Sumbar (Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, DPMPTSP, Biro Hukum, Satpol PP, Biro Perekonomian, Dinas BMCKTR) dan Kementerian ESDM	Dalam proses penanganan oleh Dinas ESDM Provinsi Sumbar

REKAPITULASI PENYELESAIAN KASUS PENGADUAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE TAHUN 2022

24.	Pengaduan tambang PT Gamindra Mitra Kesuma	pertambangan	Verifikasi Lapangan	Kabupaten Pasaman Barat	Telah dilakukan verfiikasi lapangan bersama Pemkab Pasaman Barat dan pengambilan sampling air sungai dan air limbah	Telah diterbitkan Sanksi Administratif paksaan pemerintah oleh Pemkab Pasaman Barat
25.	Pengaduan resort yang tidak memiliki perizinan	Pariwisata	Verifikasi Lapangan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Telah dilakukan verifikasi lapangan bersama Pemkab Kep. Mentawai dan Dinas Kehutanan dan DPMPTSP Prov. Sumbar	Dalam proses penanganan oleh Pemkab Kepulauan Mentawai
26.	Dugaan pencemaran batang Bayang akibat tambang PT KUATASSI	pertambangan	Koordinasi antar OPD	Kabupaten Solok	Telah dilakukan koordinasi terkait rencana verifikasi pengaduan ke areal IUP OP PT Kuatassi dengan melibatkan OPD Pemprov Sumbar, OPD Pemkab Solok dan Kementerian ESDM	Dalam proses penanganan oleh Dinas ESDM Provinsi Sumbar dan DLH Provinsi Sumbar

Padang, Desember 2022

Teguh Ariefianto, ST
Kabid P2KLPHL DLH Prov. Sumbar